



# DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK



## PERUBAHAN RENCANA KERJA

# TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan *Good Governance* yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen Pemerintah yang bersih dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Perencanaan kerja merupakan proses sistematis penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) untuk periode 1 (satu) tahun, sehingga merupakan terobosan dalam pembangunan, terutama untuk memajukan perekonomian di bidang Koperasi, Usaha mikro, Perindustrian dan perdagangan di Kota Pontianak.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2022 ini dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya urusan Koperasi dan Usaha mikro, Perdagangan, Perindustrian di Kota Pontianak.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	6
<b>BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022</b>	<b>7</b>
2.1. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	7
<b>BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b>	<b>23</b>
3.1. <b>Rencana Kerja</b>	23
3.2. PENDANAAN	46
<b>BAB V. PENUTUP</b>	<b>47</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan sebagai turunannya maka wajib disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tiap tahunnya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Memperhatikan Visi Kota Pontianak yaitu '**PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN BERMARTABAT**', serta melihat kondisi dan situasi sekarang ini di era globalisasi guna mengantisipasi tantangan pada masa yang akan datang, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah perlu terus menerus mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan landasan hukum di bidang Perencanaan Pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga terwujud sinergi dalam memformulasikan perencanaan pembangunan di Daerah. Dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-undang 25 Tahun 2004 ini juga memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan antara lain bahwa penyelenggaraan

Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
20. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 63);
21. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022-2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 disusun dengan maksud menyiapkan dokumen sinkronisasi dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dan menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN :**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

**BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

Bab ini memuat Evaluasi Rencana Kerja hingga Triwulan II Tahun 2022.

**BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Bab ini memuat telaahan terhadap Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 1(satu) tahun kedepan.

**BAB IV. PENUTUP**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 1 (satu) tahun kedepan oleh OPD.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

#### **2.1 Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak merupakan unsur pelaksana bidang koperasi, usaha mikro, industri, perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Capaian target kinerja Triwulan II Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Urusan Wajib non Pelayanan dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
  - a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan output : Jumlah pemenuhan/fasilitasi Perizinan, Target : 12 Bulan, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 50 persen (6 Bulan).
  - b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output : Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Koperasi, Target : 12 Bulan, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 50 persen (6 Bulan). Sub kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi

terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output : Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Koperasi, Target : 12 Bulan, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 50 persen (6 Bulan/40 unit koperasi).

- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output Jumlah Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Target : 12 Bulan, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 50 persen (6 Bulan).
- d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan output Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi, Target : 160 unit, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 50 persen (40 unit).
- e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan, Target : 40 unit, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 0 persen (0 unit).
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan output Jumlah wirausaha baru yang berskala mikro, Target : 50

Usaha, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 40 persen (20 Usaha).

- g. Program Pengembangan UMKM, Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dengan output Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran, Target : 40 Usaha, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 50 persen (20 Usaha).

2. Urusan Pilihan Perdagangan

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) dengan output Jumlah barang beredar yang diawasi, Target : 12 item, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 50 persen (6 item).
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan output Jumlah sarana Pasar Rakyat yang tersedia, Target : 2 Pasar, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 100 persen (2 Pasar). Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan output Jumlah Pasar Rakyat yang difasilitasi pengelolaan, Target : 17 Pasar, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 29.41 persen (5 Pasar).  
Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan output Jumlah Pasar Rakyat Yang dibina UPTD Pasar Tradisional dan Jasa Usaha Pasar, Target : 23 Pasar, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 43.48 persen (10 Pasar). Sub Kegiatan

Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan output Jumlah Pasar Rakyat yang diberdayakan, Target : 23 Pasar, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 43.48 persen (10 Pasar).

- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan output Jangka waktu pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, Target : 12 Bulan, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 50 persen (6 Bulan).

Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan output Jangka waktu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan, target : 12 Bulan, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 25 persen (3 bulan). Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan output Jumlah Operasi pasar, Target : 1 Kali, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 100 persen (1 Kali).

- d. Program Pengembangan Ekspor, Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota dengan output Jumlah Pelaku usaha yang dibina, Target : 0 Pelaku Usaha, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 0 persen (0 Pelaku Usaha).
- e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan output Jangka waktu pelaksanaan Metrologi Legal,

Target : 12 Bulan, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 25 persen (3 Bulan).

- f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan output jumlah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri, Target : 1 Kali, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 0 persen (0 Kali).

3. Urusan Pilihan Perindustrian

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dengan output Jangka waktu pemenuhan/ fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri, Target : 12 Bulan, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 50 persen (6 Bulan). Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dengan output Jumlah produk industri kreatif yang dipromosikan, Target : 40 Produk, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 100 persen (40 Produk). Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dengan output Jumlah Industri yang diberdayakan, Target : 7 Industri, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 0 persen (0 industri). Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan output Jumlah Industri yang dilatih, Target : 20 Industri, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 100 persen (20 Industri).

- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan output Jangka

waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI), Target : 12 Bulan, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 25 persen (3 Bulan).

- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas) dengan output Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), Target : 12 Bulan, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 0 persen (0 Bulan).

Berikut Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2022 :

## EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II (DUA ) TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)	Unit Perangkat daerah Penanggung jawab				
							Triwulan											
							I	II										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13=6+12	14=13/5x100%	15	16					
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
	TAHUN 2022																	
	2.17.01 .-PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	194 Persen	19.137.798.705	97 Persen	8.877.283.339	97 Persen	9.863.292.547	16 Persen	1.842.268.131	1 Persen	2.534.262.732	3 Persen	4.376.530.863	100 Persen	13.253.814.202	61% 24%	
	2.17.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen/ laporan	16.212.400	12 Dokumen / laporan	2.430.000	12 Dokumen / laporan	13.782.400	Dokumen / laporan	- Dokumen / laporan	540.000	- Dokumen/ laporan	540.000	12 Dokumen/ laporan	2.970.000	100% 18%		
	2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	8.844.800	5 Dokumen	1.980.000	5 Dokumen	6.864.800	2 Dokumen		Dokumen	540.000	2 Dokumen	540.000	7 Dokumen	2.520.000	70% 28%	
	2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	100 Sub Kegiatan	2.077.000	50 Sub Kegiatan	-	50 Sub Kegiatan	2.077.000	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	-	0 Sub Kegiatan	-	50 Sub Kegiatan	-	50%	
	2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	80 Sub Kegiatan	1.337.000	40 Sub Kegiatan	-	40 Sub Kegiatan	1.337.000	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	-	0 Sub Kegiatan	-	40 Sub Kegiatan	-	50%	
	2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	4 Laporan	2.322.800	2 Laporan	450.000	2 Laporan	1.872.800	Laporan	1 Laporan		1 Laporan	-	3 Laporan	450.000	75% 19%		
	2.17.01.2.01.07 Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	1.630.800	2 Laporan	-	2 Laporan	1.630.800	Laporan	1 Laporan		1 Laporan	-	3 Laporan	-	75%		
	2.17.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	24 Bulan	16.667.318.994	12 Bulan	8.149.866.664	12 Bulan	8.205.457.117	3 Bulan	1.685.928.357	Bulan	2.115.724.136	3 Bulan	3.801.652.493	15 Bulan	11.951.519.157	63% 72%	
	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	48 Bulan	15.970.442.994	12 Bulan	7.805.036.664	12 Bulan	7.863.041.117	3 Bulan	1.675.018.357	3 Bulan	1.973.244.136	6 Bulan	3.648.262.493	18 Bulan	11.453.299.157	38% 72%	
	2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	48 Bulan	695.510.000	12 Bulan	344.830.000	12 Bulan	341.050.000	3 Bulan	10.910.000	3 Bulan	142.480.000	6 Bulan	153.390.000	18 Bulan	498.220.000	38% 72%	
	XXX.01.2.02.05	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.366.000	1 Laporan	-	1 Laporan	1.366.000	Laporan		Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	-	50%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)	Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Unit Perangkat at daerah Ket.			
							Triwulan		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024)					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		12		13=6+12		14=13/5x100%		15 16			
		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH																		
		TAHUN 2022																		
		2.17.01.02.05 . Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	120 ASN	113.322.000	60 ASN	38.302.000	60 ASN	75.020.000	ASN	-	ASN	-	60 ASN	38.302.000	50%	34%			
		2.17.01.2.05.02	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	180 Stel	113.322.000	60 Stel	38.302.000	120 Stel	75.020.000	Stel		Stel		60 Stel	38.302.000	33%	34%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	24 Bulan	564.941.214	12 Bulan	140.624.950	12 Bulan	422.274.943	3 Bulan	51.003.487	Bulan	54.757.710	3 Bulan	105.761.197	15 Bulan	246.386.147	63%	44%	
		2.17.01.2.06.01	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	48 Bulan	23.949.821	12 Bulan	3.248.000	12 Bulan	20.695.450	Bulan		6 Bulan	3.104.598	6 Bulan	3.104.598	18 Bulan	6.352.598	38%	27%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	48 Bulan	155.667.965	12 Bulan	61.861.500	12 Bulan	93.806.465	3 Bulan	3.880.000	3 Bulan	32.050.112	6 Bulan	35.930.112	18 Bulan	97.791.612	38%	63%	
		2.17.01.2.06.02	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Unit	18.298.528	1 Unit	6.498.750	1 Unit	11.798.528	Unit		Unit	3.587.400	0 Unit	3.587.400	1 Unit	10.086.150	50%	55%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	48 Bulan	39.530.000	12 Bulan	28.042.500	12 Bulan	10.420.000	3 Bulan	900.000	3 Bulan	4.006.500	6 Bulan	4.906.500	18 Bulan	32.949.000	38%	83%	
		2.17.01.2.06.03	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan pengandaan	48 Bulan	74.888.900	12 Bulan	33.474.200	12 Bulan	41.408.500	Bulan		6 Bulan	2.067.100	6 Bulan	2.067.100	18 Bulan	35.541.300	38%	47%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48 Bulan	14.460.000	12 Bulan	7.500.000	12 Bulan	6.000.000	3 Bulan	820.000	3 Bulan	1.230.000	6 Bulan	2.050.000	18 Bulan	9.550.000	38%	66%	
		2.17.01.2.06.04	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	48 Bulan	238.146.000	12 Bulan	-	12 Bulan	238.146.000	2 Bulan	45.403.487	4 Bulan	8.712.000	6 Bulan	54.115.487	18 Bulan	54.115.487	38%	23%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43 Unit	353.585.657	3 Unit	16.218.200	40 Unit	336.062.860	27 Unit	13.076.550	Unit	253.738.500	27 Unit	266.815.050	30 Unit	283.033.250	70%	80%	
		2.17.01.2.07.10	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43 Unit	353.585.657	3 Unit	16.218.200	40 Unit	336.062.860	6 Unit	13.076.550	21 Unit	253.738.500	27 Unit	266.815.050	30 Unit	283.033.250	70%	80%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 ( Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.			
										Triwulan											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5x100%	15	16						
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																				
	BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH																				
	TAHUN 2022																				
	02.17.03 . PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	38 Persen	58.805.038	19 Persen	15.908.000	19 Persen	41.958.200	Persen	-	Persen	14.871.500	19 Persen	14.871.500	38 Persen	30.779.500	100%	52%			
	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	38 Persen	58.805.038	19 Persen	15.908.000	19 Persen	41.958.200	Persen	-	Persen	14.871.500	- Persen	14.871.500	19 Persen	30.779.500	50%	52%			
	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Koperasi	48 Bulan	24.586.700	0 Bulan	-	12 Bulan	24.586.700	Bulan	-	6 Bulan	-	6 Bulan	-	6 Bulan	-					
	2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Keputuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Koperasi	48 Bulan	34.218.338	12 Bulan	15.908.000	12 Bulan	17.371.500	Bulan	-	6 Bulan	14.871.500	6 Bulan	14.871.500	18 Bulan	30.779.500	38%	90%			
	02.17.04 . PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	16,67 Persen	3.670.800	Persen	-	16,67 Persen	3.670.800	Persen	-	Persen	-	- Persen	-	- Persen	-	0%				
	2.17.04.2.01. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3 Persen	3.670.800	Persen	-	3 Persen	3.670.800	Persen	-	Persen	-	- Persen	-	- Persen	-	0%				
	2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	48 Bulan	3.670.800	0 Bulan	-	12 Bulan	3.670.800	Bulan	-	6 Bulan	-	6 Bulan	-	6 Bulan	-	13%				
	02.17.05 . PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	50 Persen	795.248.639	31 Persen	394.448.430	19 Persen	400.800.000	Persen	-	Persen	19.434.880	- Persen	19.434.880	31 Persen	413.883.310	62%	52%			
	2.17.05.2.01. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	50 Persen	795.248.639	31 Persen	394.448.430	19 Persen	400.800.000	Persen	-	Persen	19.434.880	- Persen	19.434.880	31 Persen	413.883.310	62%	52%			
	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	320 Unit	795.248.639	160 Unit	394.448.430	160 Unit	400.800.000	Unit	-	40 Unit	19.434.880	40 Unit	19.434.880	200 Unit	413.883.310	63%	52%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 ( Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.		
							Triwulan		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 ( Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024					
							5	6	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4														14=13/5x100%			
		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																15	16	
		BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH																		
		02.17.06 . PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10 Persen	8.829.000	Persen		10 Persen	8.829.000	Persen		Persen		- Persen		- Persen		0%		
		2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/kota	persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	2 Persen	8.829.000	Persen		2 Persen	8.829.000	Persen		Persen		- Persen		- Persen		0%		
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembayaran, Penguan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	40 Unit	8.829.000	Unit	40 Unit	8.829.000	Unit		Unit		0 Unit		0 Unit		0%		
		Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	02.17.07 . PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	8 Persen	30.700.000	3 Persen	18.000.000	5 Persen	12.700.000	Persen	1.812.500	Persen	4.000.000	- Persen	5.812.500	5 Persen	23.812.500	63% 78%	
		2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	4 Persen	30.700.000	1 Persen	18.000.000	3 Persen	12.700.000	Persen	1.812.500	Persen	4.000.000	- Persen	5.812.500	1 Persen	23.812.500	25% 78%		
		2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah wirausaha baru yang berskala mikro	80 Usaha	30.700.000	30 Usaha	18.000.000	50 Usaha	12.700.000	Usaha	1.812.500	20 Usaha	4.000.000	20 Usaha	5.812.500	50 Usaha	23.812.500	63% 78%	
		02.17.08 . PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	4 Persen	1.551.652.200	1 Persen	198.924.194	3 Persen	1.350.866.200	Persen	1.129.766.000	Persen	60.101.300	- Persen	1.189.867.300	1 Persen	1.388.791.494	25% 90%		
		2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	4 Persen	1.551.652.200	1 Persen	198.924.194	3 Persen	1.350.866.200	Persen	1.129.766.000	Persen	60.101.300	- Persen	1.189.867.300	1 Persen	1.388.791.494	25% 90%		
		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	81 Usaha	1.551.652.200	40 Usaha	198.924.194	40 Usaha	1.350.866.200	1 Usaha	1.129.766.000	20 Usaha	60.101.300	21 Usaha	1.189.867.300	61 Usaha	1.388.791.494	75% 90%	
Jumlah					21.589.466.282		9.504.563.963		11.684.878.647	-	-	-	-	-	5.606.517.043		15.111.081.006			
Rata-rata Capaian Kinerja(%)																		62%	59%	
Predikat Kinerja																		Rendah	Rendah	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 ( Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)	Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.		
							Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 ( Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024								
							I	II	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13=6+12	14=13/5x100%	15	16						
		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
		TAHUN 2022																	
		2.17.01.2.08 . Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 Bulan	837.017.991	12 Bulan	383.420.960	3 Bulan	416.912.978	3 Bulan	88.514.737	Bulan	93.526.786	3 Bulan	182.041.523	15 Bulan	565.462.483	63% <span style="background-color: #FFFF99;">68%</span>	
		2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	48 Bulan	678.741.191	12 Bulan	304.021.963	12 Bulan	339.974.578	3 Bulan	76.608.337	3 Bulan	70.167.186	6 Bulan	146.775.523	18 Bulan	450.797.486	38% <span style="background-color: #FFFF99;">66%</span>
		2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	48 Bulan	158.276.800	12 Bulan	79.398.997	12 Bulan	76.938.400	3 Bulan	11.906.400	3 Bulan	23.359.600	6 Bulan	35.266.000	18 Bulan	114.664.997	38% <span style="background-color: #FFFF99;">72%</span>
		2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	24 Unit	585.400.449	12 Unit	146.420.565	12 Unit	393.782.249	3 Unit	3.745.000	Unit	15.975.600	3 Unit	19.720.600	15 Unit	166.141.165	63% <span style="background-color: #FFFF99;">28%</span>
		2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 Unit	27.312.000	2 Unit	27.226.065	Unit		Unit		Unit	0 Unit		2 Unit	27.226.065	100% <span style="background-color: #FFFF99;">100%</span>	
		2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	14 Unit	76.907.200	7 Unit	3.201.500	7 Unit	73.672.000	2 Unit	3.745.000	4 Unit	7.042.600	6 Unit	10.787.600	13 Unit	13.989.100	93% <span style="background-color: #FFFF99;">18%</span>
		2.17.01.2.09.06	Jangka waktu pemeliharaan peralatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	gedung kantor yang dipelihara	48 Bulan	159.161.000	12 Bulan	30.604.000	12 Bulan	84.381.000	Bulan		6 Bulan	8.933.000	6 Bulan	8.933.000	18 Bulan	39.537.000	38% <span style="background-color: #FFFF99;">25%</span>
		2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	322.020.249	1 Unit	85.389.000	2 Unit	235.729.249	Unit		Unit	0 Unit		1 Unit	85.389.000	20% <span style="background-color: #FFFF99;">27%</span>	
Meningkatnya Koperasi yang Aktif	02.17.02 . PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Percentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	1,53 Persen	2.761.900	0,57 Persen	-	0,96 Persen	2.761.900	Persen	-	Persen	-	Persen	-	0,57 Persen	-	37% <span style="background-color: #FFFF99;">37%</span>		
		2.17.02.2.01. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	200 Persen	2.761.900	100 Persen	-	100 Persen	2.761.900	Persen	-	Persen	-	Persen	-	100 Persen	-	50% <span style="background-color: #FFFF99;">50%</span>	
		2.17.01.2.07.10	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan/fasilitasi Perizinan	24 Bulan	2.761.900	12 Bulan	-	12 Bulan	2.761.900	Bulan	-	6 Bulan	-	6 Bulan	-	18 Bulan	-	75% <span style="background-color: #FFFF99;">75%</span>

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)	Unit Perangkat daerah Penanggung jawab				
							Triwulan											
							I	II										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12		13=6+12		14=13/5x100%	15				
		URUSAN PILIHAN																
		BIDANG PERDAGANGAN																
		TAHUN 2022																
1	Terkendalinya Laju Inflasi	03.30.02 -PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Percentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan ( IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	400 Persen	116.879.800	100 Persen	35.189.000	100 Persen	77.939.800	Persen	- 50 Persen	- 50 Persen	150 Persen	35.189.000 38% 30%				
		3.30.02.2.06 .-Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	400 Persen	116.879.800	100 Persen	35.189.000	100 Persen	77.939.800	Persen	- 50 Persen	- 50 Persen	150 Persen	35.189.000 38% 30%				
		3.30.02.2.06.03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah barang beredar yang diawasi	12 item	116.879.800	12 item	35.189.000	12 item	77.939.800	item	6 item	6 item	18 item	35.189.000 150% 30%				
1	Meningkatnya Pasar Rakyat Binaan yang memenuhi SNI Pasa	03.30.03 -PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Percentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	24% Persen	5.300.785.273	12% Persen	2.303.376.750	12% Persen	2.988.695.932	3% Persen	208.362.000	2 Persen	902.612.900	203% Persen	1.110.974.900 215% Persen 3.414.351.650 895% 64%			
		3.30.03.2.01 .-Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Percentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah	82% Persen	4.795.645.332	41% Persen	2.139.621.050	41% Persen	2.647.935.932	10% Persen	208.362.000	5 Persen	808.453.000	510% Persen	1.016.815.000 551% Persen 3.156.436.050 672% 66%			
		3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana Pasar Rakyat yang tersedia	4 Pasar	1.881.865.332	2 Pasar	798.887.400	2 Pasar	1.081.327.932	Pasar	2 Pasar	399.660.000	2 Pasar	399.660.000 4 Pasar 1.198.547.400 100% 64%				
		3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang difasilitasi pengelolaan	34 Pasar	2.913.780.000	17 Pasar	1.340.733.650	17 Pasar	1.566.608.000	5 Pasar	208.362.000	5 Pasar	408.793.000	10 Pasar	617.155.000 27 Pasar 1.957.888.650 79% 67%			
		3.30.03.2.02 .-Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Percentase perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko swalayan	200 Persen	505.139.941	100 Persen	163.755.700	100 Persen	340.760.000	Persen	- 50 Persen	94.159.900	50	94.159.900 150 Persen 257.915.600 75% 51%				
		3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat Yang dibina UPTD Pasar Tradisional dan Jasa Usaha Pasar	23 Pasar	155.638.200	23 Pasar	35.688.200	23 Pasar	119.440.000	Pasar	10 Pasar	93.520.000	10 Pasar	93.520.000 33 Pasar 129.208.200 143% 83%				
		3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang diberdayakan	23 Pasar	349.501.741	23 Pasar	128.067.500	23 Pasar	221.320.000	Pasar	10 Pasar	639.900	10 Pasar	639.900 33 Pasar 128.707.400 143% 37%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 ( Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab						
								Triwulan															
								I		II													
1	2	3	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=13/5x100%	15				
		URUSAN PILIHAN																					
		BIDANG PERDAGANGAN																					
		TAHUN 2022																					
Terkendalinya Laju Inflasi	03.30.04.- PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1. Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 2. Persentase kinerja realisasi pupuk	83 Persen 100 Persen	191.328.300	83 Persen 100 Persen	85.137.249	83 Persen 100 Persen	104.365.000	Persen Persen	5.953.200	83 Persen 100 Persen	58.579.800	83 Persen 100 Persen	64.533.000	83 Persen 100 Persen	11.000.000	38%	6%					
	3.30.04.2.01 .-Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	48 Bulan	13.800.000	12 Bulan	6.900.000	12 Bulan	6.900.000	Bulan	-	6 Bulan	4.100.000	6 Bulan	4.100.000	18 Bulan	11.000.000	38%	80%					
	3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jangka waktu pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	48 Bulan	13.800.000	12 Bulan	6.900.000	12 Bulan	6.900.000	Bulan	-	6 Bulan	4.100.000	6 Bulan	4.100.000	18 Bulan	11.000.000	38%	80%					
	3.30.04.2.02 .-Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	<5% Persen	177.528.300	<5% Persen	78.237.249	<5% Persen	97.465.000	<5% Persen	5.953.200	Persen	54.479.800	<5% Persen	60.433.000	<5% Persen	101.136.249	100%	57%					
	3.30.04.2.02.02	Jangka waktu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	48 Bulan	139.894.300	12 Bulan	72.153.249	12 Bulan	65.915.000	3 Bulan	5.953.200	3 Bulan	23.029.800	6 Bulan	28.983.000	18 Bulan	101.136.249	38%	72%					
	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi pasar	4 Kali	37.634.000	1 Kali	6.084.000	1 Kali	31.550.000	Kali	-	1 Kali	31.450.000	1 Kali	31.450.000	2 Kali	37.534.000	50%	100%				
Meningkatnya Volume usaha Ekport	03.30.05.-PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha eksport yang dibina	24 Persen	32.700.950	- Persen	-	26 Persen	32.700.950	Persen	-	- Persen	-	0 Persen	-	- Persen	-	0% 0%						
	3.30.05.2.01 .-Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang	4 Kali	32.700.950	1 Kali	-	1 Kali	32.700.950	Kali	-	Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	0% 0%						
	3.30.05.2.01.01	Jumlah Pelaku usaha yang dibina	75 Pelaku Usaha	32.700.950	0 Pelaku Usaha	-	75 Pelaku Usaha	32.700.950	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	0 Pelaku Usaha	-	0 Pelaku Usaha	-	0% 0%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu ( 2021 )	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Berjalan (2022 ) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 ( Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)	Unit Perangkat daerah Penangu ng jawab				
							Triwulan											
							I		II									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13=6+12	14=13/5x100%	15						
		URUSAN PILIHAN																
		BIDANG PERDAGANGAN																
	TAHUN 2022																	
Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	03.30.06.-PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Percentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) bertanda tera sah yang berlaku	193 Persen	762.680.181	96 Persen	345.027.065	97 Persen	406.835.000	25 Persen	66.674.898	25 Persen	142.908.312	50 Persen	209.583.210	146 Persen	554.610.275	76% 73%	
	3.30.06.2.01 .-Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Percentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	400 Persen	762.680.181	100 Persen	-	100 Persen	406.835.000	25 Persen	66.674.898	25 Persen	142.908.312	50 Persen	209.583.210	150 Persen	554.610.275	38% 73%	
	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jangka waktu pelaksanaan Metrologi Legal	48 Bulan	762.680.181	12 Bulan	345.027.065	12 Bulan	406.835.000	3 Bulan	66.674.898	3 Bulan	142.908.312	6 Bulan	209.583.210	18 Bulan	554.610.275	38% 73%	
Meningkatnya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	03.30.07.-PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Percentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.	100% Persen	9.357.000	- Persen	- 100% Persen	9.357.000	Persen	- - Persen	-	-	-	- Persen	-	- Persen	-	0%	
	3.30.07.2.01 .- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri	12 Bulan	9.357.000	- Bulan	- 100% Bulan	9.357.000	Bulan	- - Bulan	-	-	-	- Bulan	-	- Bulan	-	0%	
	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri	1 Kali	9.357.000	0 Kali	- 1 Kali	9.357.000	Kali	-	Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	-		
Jumlah				6.413.731.504			3.619.893.682		280.990.098		1.104.101.012		1.385.091.110		4.153.821.174			
Rata-rata Capaian Kinerja(%)															261% 29%			
Predikat Kinerja															Tinggi Rendah			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.					
							Triwulan												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13=6+12	14=13/5x100%	15	16						
		URUSAN PILIHAN																	
		BIDANG PERINDUSTRIAN																	
		TAHUN 2022																	
	Meningkatnya sarana prasarana klaster Industri	03.31.02.-PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Percentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	400 Persen	557.247.050	100 Persen	165.325.400	100 Persen	386.491.800	25 Persen	80.859.200	25 Persen	33.075.400	50 Persen	113.934.600	150 Persen	279.260.000	38% 20%	
		3.31.02.2.01.01	-Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Percentase terselesaikannya dokumen RPIPK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	400 Persen	557.247.050	100 Persen	165.325.400	100 Persen	386.491.800	25 Persen	80.859.200	25 Persen	33.075.400	50 Persen	113.934.600	150 Persen	279.260.000	38% 20%
		3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	24 Bulan	82.411.350	12 Bulan	36.769.500	12 Bulan	40.938.000	Bulan		6 Bulan	1.300.000	6 Bulan	1.300.000	18 Bulan	38.069.500	75% 46%
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah produk industri kreatif yang dipromosikan	40 Produk	210.034.000	0 Produk	-	40 Produk	210.034.000	40 Produk	74.906.000	Produk		40 Produk	74.906.000	40 Produk	74.906.000	100% 36%
		3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Industri yang diberdayakan	14 Industri	103.329.700	7 Industri	76.964.000	7 Industri	25.639.700	Industri		Industri		0 Industri		7 Industri	76.964.000	50% 74%
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Industri yang dilatih	40 Industri	161.472.000	20 Industri	51.591.900	20 Industri	109.880.100	Industri	5.953.200	20 Industri	31.775.400	20 Industri	37.728.600	40 Industri	89.320.500	100% 55%
	Meningkatnya kelayakan perijinan industri	03.31.03.-PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	4,97% Persen	6.401.000	2,47% Persen	3.195.000	2,5% Persen	3.200.000	Persen	- Persen	- Persen	0% Persen	- Persen	3.195.000	50%	0%		
		3.31.03.2.01	-Penerbitan izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Percentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	200% Persen	6.401.000	100% Persen	3.195.000	100% Persen	3.200.000	25% Persen	- Persen	- Persen	25% Persen	- Persen	125% Persen	3.195.000	63% 0%	
		3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	24 Bulan	6.401.000	12 Bulan	3.195.000	12 Bulan	3.200.000	3 Bulan		Bulan		3 Bulan	-	15 Bulan	3.195.000	63% 50%

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 ( Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)	Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.
							I	II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13=6+12	14=13/5x100%	15	16
		URUSAN PILIHAN											
		BIDANG PERINDUSTRIAN											
		TAHUN 2022											
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Baru	03.31.04.- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100% Persen	6.443.800	Persen	- 100% Persen	6.443.800	Persen	- Persen	- 0% Persen	- Persen	50%	
	3.31.04.2.01 .Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota	100% Persen	6.443.800	- Persen	- 100% Persen	6.443.800	Persen	- Persen	- 0% Persen	- Persen	50%	
	3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	24 Bulan	6.443.800	12 Bulan	12 Bulan	6.443.800	Bulan	Bulan	0 Bulan	12 Bulan	50%	
Jumlah				570.091.850			396.135.600			113.934.600	282.455.000		
Rata-rata Capaian Kinerja(%)												46%	10%
Predikat Kinerja												Rendah	Rendah

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **3.1 Rencana Kerja**

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UKM di Kota Pontianak. Adapun rumusan tujuan di dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 adalah :

##### **1. Meningkatkan Sektor Perdagangan**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

##### **2. Meningkatkan Sektor Industri**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

##### **3. Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator persentase koperasi yang berkualitas dan persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam RENJA Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 adalah :

##### **1. Meningkatnya Pasar Rakyat Binaan yang memenuhi SNI Pasar.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar.

**2. Meningkatnya Volume usaha Ekpor**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Volume Ekspor ( ton ).

**3. Terkendalinya Laju Inflasi.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan.

**4. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase hasil temuan pegawasan barang beredar yang ditindak lanjuti.

**5. Meningkatnya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

**6. Meningkatnya sarana prasarana klaster Industri**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri.

**7. Meningkatnya kelayakan perijinan industri**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan.

**8. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Baru**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase pertumbuhan industri.

**9. Meningkatnya Koperasi yang Aktif**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase koperasi aktif.

**10. Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru.

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang direncanakan untuk Tahun 2022 meliputi:

## 1. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Indikator kinerja: Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang ditingkatkan.

Kegiatan :

### a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Keluaran (Output): Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya.

Kelompok sasaran: pasar rakyat.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

### b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

Indikator Keluaran (Output): Persentase perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko swalayan.

Kelompok sasaran: pasar rakyat.

Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

## 2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Indikator Kinerja: Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).

Kegiatan:

a. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2).

### 3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG

Indikator kinerja: Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Kegiatan:

a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase koefisien variasi harga antar waktu.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

#### 4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Indikator kinerja: Persentase Pelaku Usaha eksport yang dibina

Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

#### 5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Indikator kinerja: Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP ) bertanda tera sah yang berlaku.

Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Indikator Keluaran (Output): Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan.

Kelompok sasaran: alat UTTP

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

#### 6. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Indikator kinerja: Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.

Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Indikator Keluaran ( Output): Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

## 7. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Indikator kinerja : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP.

Kegiatan:

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (*Output*) : Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA.

Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri.
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

## 8. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA.

Indikator kinerja : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Kegiatan:

- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (*Output*): Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

## 9. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Indikator kinerja: Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

Kegiatan:

- a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota.

Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

## 10. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Indikator kinerja: Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan:

- a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: Koperasi

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

## 11. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Indikator kinerja: Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi.

Kegiatan:

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: Koperasi

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundangan Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

## 12. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Indikator kinerja: Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT

Kegiatan:

- a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: Koperasi

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

## 13. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Indikator kinerja: Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan:

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: Koperasi

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

#### 14. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI.

Indikator kinerja: Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan:

- a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (*Output*): Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan.

Kelompok sasaran: Koperasi

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

#### 15. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM).

Indikator kinerja: Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan

Kegiatan:

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

Indikator Keluaran (*Output*): Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha Mikro

Sub Kegiatan :

- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

#### 16. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Indikator kinerja: Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya

Kegiatan:

- a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

Indikator Keluaran (*Output*): persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha Mikro

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

## 17. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Indikator kinerja: Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah.

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran ( Output) : Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah

Kelompok sasaran : OPD

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianya

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran: Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah.

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran: Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran: Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran: Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara.

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Adapun untuk Perubahan Rencana Kerja Pendapatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dapat dilihat pada table berikut:

Tabel Ringkasan Anggaran Pendapatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

No	Uraian Pendapatan	Keterangan	Nilai
1.	Retribusi Pelataran	Retribusi Pelataran Pasar	60.000.000
2.	Retribusi Los	Retribusi Los	1.800.000.000
3.	Retribusi Kios	Retribusi Kios Pasar	1.880.800.000
4.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	240.000.000
5.	Hasil Sewa BMD	Penyewaan bangunan Pasar	2.019.200.000
	<b>TOTAL</b>		<b>6.000.000.000</b>

Perubahan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung program dan kegiatan prioritas daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kota Pontianak**  
**Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN  
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja										Catata n Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan													
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																				
2	1	7		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>										12,833,590,870									
2	1	7	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										11,977,202,900									
2	1	7	1	2.	01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										13,567,500							
2	1	7	1	0	2.	01	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Percentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen /laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	5 Dokumen	5 Dokumen	12 Dokumen/Laporan	12 Dokumen/Laporan	6,864,800	2,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	6,200,000
2	1	7	1	0	2.	01	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Percentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	50 Sub Kegiatan	50 Sub Kegiatan	12 Dokumen/Laporan	12 Dokumen/Laporan	2,077,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	1,550,000
2	1	7	1	0	2.	01	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Percentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	40 Sub Kegiatan	40 Sub Kegiatan	12 Dokumen/Laporan	12 Dokumen/Laporan	1,337,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	1,550,000
2	1	7	1	0	2.	01	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Percentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Laporan	2 Laporan	12 Dokumen/Laporan	12 Dokumen/Laporan	1,872,800	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	3,262,500
2	1	7	1	0	2.	01	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Laporan	2 Laporan	12 Dokumen/Laporan	12 Dokumen/Laporan	1,630,800	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	1,005,000
2	1	7	1	0	2.	02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										8,205,457,117	7,833,454,624	10,756,055,000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur
2 1 7 1 0 2 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	7,863,041,117	7,514,284,624	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	10,263,000,000	
2 1 7 1 0 1 0 2 0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	341,050,000	319,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	492,050,000	
2 1 7 1 0 2 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	1,366,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	1,005,000
2 1 7 1 0 2 0 05	Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah											75,020,000	67,820,000				79,720,000
2 1 7 1 0 2 0 05 2	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	120 Setel	120 Setel	60 ASN	60 ASN	75,020,000	67,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	79,720,000
2 1 7 1 0 2 0 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											422,274,943	284,433,714				392,372,000
2 1 7 1 0 2 0 06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	20,695,450	13,661,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	8,238,000
2 1 7 1 0 2 0 06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	93,806,465	93,697,854	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	137,900,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
21702063	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Bulan	20 Unit	12 Bulan	12 Bulan	11,798,528	10,006,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	6,500,000	
217102064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	10,420,000	18,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	18,280,000	
217102065	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	41,408,500	25,778,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	72,300,000	
217102066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6,000,000	4,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	12,965,000	
217102069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	238,146,000	117,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	136,189,000	
21710207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										336,062,860	450,231,571					79,860,000	
217102071	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	10 Unit	21 Unit	12 unit	12 unit	336,062,860	450,231,571	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	79,860,000	
21710208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										416,912,978	416,912,978					463,538,400	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah	
21020820	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	339,974,578	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	376,600,000	
21020840	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	76,938,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	86,938,400	
210209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											393,782,249	352,141,249			192,090,000	
21020920	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	6 Unit	6 Unit	10 unit	10 unit	73,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	39,535,000	
21020906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	10 unit	10 unit	84,381,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	65,733,000	
21020909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Unit	2 Unit	10 unit	10 unit	235,729,249	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	52,682,000	
2102	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM											2,761,900	0			6,000,000	
210201	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota											2,761,900	0			6,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	
2.1.2.01.0	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi aktif	Jumlah pemerlukan/fasilitasi Perizinan	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,80 %	95,80 %	12 Bulan	12 Kali	0,96 %	0,96 %	2,761,900	2,761,900	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase koperasi aktif	95,80 %	6,000,000
2.1.0.3	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>												41,958,200	36,823,200				73,054,250
2.1.0.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota												41,958,200	36,823,200				73,054,250
2.1.3.01.0	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi aktif	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Koperasi	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,80 %	95,80 %	12 Bulan	12 Kali	19,16 %	19,16 %	24,586,700	20,951,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase koperasi aktif	95,80 %	37,975,250	
2.1.3.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi aktif	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Koperasi	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,80 %	95,80 %	12 Bulan	12 Kali	19,16 %	19,16 %	17,371,500	15,871,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase koperasi aktif	95,80 %	35,079,000	
2.1.0.4	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>												3,670,800	7,305,800				10,895,000
2.1.0.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												3,670,800	7,305,800				10,895,000
2.1.0.2.01.0	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi aktif	Jumlah Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP yang bernilai SEHAT	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,80 %	95,80 %	12 Bulan	12 Kali	17 %	17 %	3,670,800	7,305,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase koperasi aktif	95,80 %	10,895,000	
2.1.0.5	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>												400,800,000	400,800,000				394,448,720
2.1.0.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota												400,800,000	400,800,000				394,448,720
2.1.0.2.01.0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,80 %	95,80 %	200 Unit	200 Unit	19 %	19 %	400,800,000	400,800,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase koperasi aktif	95,80 %	394,448,720	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2.1.0.7.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI												8,829,000	0		26,000,000	
2.1.0.7.6.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota												8,829,000	0		26,000,000	
2.1.0.7.6.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguanan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.80 %	95.80 %	40 Unit	40 Unit	10 %	10 %		8,829,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase koperasi aktif 95.80 %	26,000,000
2.1.0.7.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)												12,700,000	12,700,000			60,615,000
2.1.0.7.7.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguanan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pernangku Kepentingan												12,700,000	12,700,000			60,615,000
2.1.0.7.7.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	Jumlah wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.30 %	4.30 %	50 Usaha	50 Usaha	5 %	5 %		12,700,000	12,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru 4.30 %	60,615,000
2.1.0.7.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												1,350,866,200	1,310,161,200			285,375,000
2.1.0.7.8.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil												1,350,866,200	1,310,161,200			285,375,000
2.1.0.7.8.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.30 %	4.30 %	40 Usaha	40 Usaha	3 %	3 %		1,350,866,200	1,310,161,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru 4.30 %	285,375,000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3.3.0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												3,619,893,682	3,002,159,200			3,013,519,900
3.3.0.2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN												77,939,800	52,035,000			86,940,950
3.3.0.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota												77,939,800	52,035,000			86,940,950

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3 0 2. 06 0 3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Percentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	Jumlah barang beredar yang diawasi	Percentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan ( IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Item	12 Item	100 %	100 %	77,939,800	52,035,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %	86,940,950		
3 0 3	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>										2,988,695,932	2,440,423,000					2,321,191,000		
3 0 3 2. 0 0 1	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>										2,647,935,932	2,175,347,000					2,125,197,000		
3 0 3 2. 0 1 0 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Percentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	Jumlah sarana Pasar Rakyat yang tersedia	Percentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.76 %	11.76 %	2 Pasar	2 Pasar	35 %	35 %	1,081,327,932	759,376,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	11.76 %	515,997,000		
3 0 3 2. 0 1 0 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Percentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi pengelolaan	Jumlah Pasar Rakyat yang difasilitasi pengelolaan	Percentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.76 %	11.76 %	17 Pasar	17 Pasar	35 %	35 %	1,566,608,000	1,415,971,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	11.76 %	1,609,200,000		
3 0 2. 0 0 2	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>										340,760,000	265,076,000					195,994,000		
3 0 3 2. 0 2 0 1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Percentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	Jumlah Pasar Rakyat Yang dibina UPTD Pasar Tradisional dan Jasa Usaha Pasar	Percentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.76 %	11.76 %	23 Pasar	23 Pasar	35 %	35 %	119,440,000	105,106,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	11.76 %	29,925,000		
3 0 3 2. 0 2 0 2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Percentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	Jumlah Pasar Rakyat yang diberdayakan	Percentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.76 %	11.76 %	23 Pasar	23 Pasar	35 %	35 %	221,320,000	159,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	11.76 %	166,069,000		
3 0 4	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>										104,365,000	95,019,200					126,629,200		
3 0 4 2. 0 0 1	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>										6,900,000	6,900,000					12,800,000		
3 0 4 2. 0 1 0 3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Percentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	Jangka waktu pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	92 %	92 %	6,900,000	6,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %	12,800,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum		Sesudah			
3 0 4 02 02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Percentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	Jangka waktu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	92 %	92 %	65,915,000	56,669,200	88,119,200	97,465,000	113,829,200	
3 0 4 02 02	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Percentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	Jumlah Operasi pasar	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Kali	2 Kali	92 %	92 %	31,550,000	31,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100 %	90,619,200
3 0 4 02 03	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR											32,700,950	0				60,958,750	
3 0 5 01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											32,700,950	0				60,958,750	
3 0 5 01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Volume Ekspor ( ton )	Jumlah Pelaku usaha yang dibina	Percentase Pelaku Usaha eksport yang dibina	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	575.906 Ton	575.906 Ton	10 Usaha	0 Usaha	24 %	24 %	32,700,950	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Volume Ekspor ( ton )	575.906 Ton	60,958,750	
3 0 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN											406,835,000	405,325,000				390,900,000	
3 0 6 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan											406,835,000	405,325,000				390,900,000	
3 0 6 01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Percentase hasil temuan pegawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	Jangka waktu pelaksanaan Metrologi Legal	Percentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) bertanda tera sah yang berlaku	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	97 %	97 %	406,835,000	405,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase hasil temuan pegawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	100 %	390,900,000	
3 0 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI											9,357,000	9,357,000				26,900,000	
3 0 7 01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri											9,357,000	9,357,000				26,900,000	
3 0 7 01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Percentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri	Percentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	2 Kali	2 Kali	100 %	100 %	9,357,000	9,357,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	40 %	26,900,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023														
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)											
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
3 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											396,135,600	275,167,900				568,712,100										
3 1 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI											386,491,800	265,524,100				544,910,050										
3 1 2. 0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota											386,491,800	265,524,100				544,910,050										
3 1 0 2. 0 2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Percentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi saranan pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 %	14 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	40,938,000	40,438,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri	14 %	60,138,500											
3 1 0 2. 0 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Percentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri	Jumlah produk industri kreatif yang dipromosikan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 %	14 %	40 Produk	40 Produk	100 %	100 %	210,034,000	117,506,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri	14 %	289,331,550											
3 1 0 2. 0 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Percentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri	Jumlah Industri yang diberdayakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 %	14 %	8 Industri	0 Industri	100 %	100 %	25,639,700	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri	14 %	127,789,000											
3 1 0 2. 0 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Percentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri	Jumlah Industri yang dilatih	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 %	14 %	25 Industri	25 Industri	100 %	100 %	109,880,100	107,580,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri	14 %	67,651,000											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		
3 1 0 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA												3,200,000	3,200,000		4,283,000		
3 1 0 2.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota												3,200,000	3,200,000		4,283,000		
3 1 0 3 01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Percentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan	Jangka waktu pemuatan/fasilitas Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI)	Percentase Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	90 %	90 %	3,200,000	3,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan	90 %	4,283,000	
3 1 0 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL												6,443,800	6,443,800		19,519,050		
3 1 0 2. 01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota												6,443,800	6,443,800		19,519,050		
3 1 0 2. 01 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Percentase pertumbuhan industri	Jangka waktu pemuatan/fasilitas Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Percentase informasi industri secara lengkap dan terkini	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.36 %	2.36 %	12 Bulan	12 Bulan	25 %	25 %	6,443,800	6,443,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percentase pertumbuhan industri	2.36 %	19,519,050	
TOTAL												15,700,907,929	14,452,151,436				16,415,822,870	

Berdasarkan surat edaran Bappeda nomor : 050/394/Bapp.2/2022 Tanggal 23 Juni 2022 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, total pagu anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah sebesar Rp.14.452.151.436,- untuk 17 Program, 25 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan. Pagu tersebut mengalami perubahan dari yang awalnya sebesar Rp.15.700.907.929,- menjadi Rp. 14.452.151.436,-. Berdasarkan kebijakan tersebut, pagu dasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mengalami efisiensi berupa penurunan sebesar Rp.900.000.000,-.

Pada Perubahan Renja Tahun 2022, terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan target menjadi 0 dikarenakan terdapat refocussing anggaran sebagai tindakan efisiensi. Adapun sub kegiatan tersebut adalah, sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten / Kota dan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang bertema "Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural" terdapat 7 Prioritas Nasional. Dan salah satunya adalah Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi.

Situasi Pandemi Corona Virus 19 (Covid-19) telah mengganggu aktivitas perekonomian nasional, dimana kegiatan usaha mengalami gangguan baik dalam proses produksi, distribusi dan kegiatan operasional lainnya yang akhirnya mengganggu kinerja perekonomian nasional. Dalam menghadapi situasi ini, Pemerintah mengeluarkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna menghadapi situasi pandemi Covid-19 saat ini. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha termasuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pelaksanaan Program PEN diharapkan dapat meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh dunia usaha karena dampak Covid-19 ini.

Adapun Prinsip Program PEN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 adalah:

- a. Asas keadilan sosial;
- b. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- c. Mendukung Pelaku Usaha
- d. Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Tidak menimbulkan *moral hazard*; dan
- f. Adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

### 3.2 Pendanaan

Pendanaan untuk mencapai perubahan rencana kerja yang telah ditetapkan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 berasal dari APBD Kota Pontianak dan Dana Alokasi Khusus untuk bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Dana Alokasi Khusus berupa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PK2UKM). Perincian dana ini juga sudah termasuk pendanaan hibah untuk Dekranasda Kota Pontianak yang rencananya sebesar Rp. 1,1 Milyar.

Adapun pagu yang ditetapkan pada perubahan rencana kerja tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang semula sebesar Rp.15.700.907.929,00 menjadi sebesar Rp.14.452.151.436,00.

Tabel Jumlah Program Dan Kegiatan Dan Pagu Indikatif

BIDANG	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
Sekretariat	1 Program	7 Kegiatan	23 Sub Kegiatan	9.407.034.136
Perindustrian	3 Program	3 Kegiatan	6 Sub Kegiatan	275.167.900
Perdagangan	5 Program	6 Kegiatan	7 Sub Kegiatan	561.736.200
Pasar	1 Program	2 Kegiatan	4 Sub Kegiatan	2.440.423.000
Koperasi dan Usaha Mikro	7 Program	7 Kegiatan	8 Sub Kegiatan	1.767.790.200
<b>Jumlah</b>	<b>17 Program</b>	<b>25 Kegiatan</b>	<b>48 Sub Kegiatan</b>	<b>14.452.151.436</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikehendaki.

Perubahan Rencana Kerja juga digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi program kerja tahunan, dimana hasil-hasil yang dicapai apakah telah sesuai dengan program dan kegiatan yang tercantum di dalam program dan sasaran yang bersifat makro.

Semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022 ini bermanfaat untuk dijadikan bahan masukan bagi pencitraan Manajemen Publik dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dan mewujudkan “Good Governance” di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak khususnya dan Pemerintah Kota Pontianak pada umumnya.



**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN  
PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK**

*Jalan Alianyang No. 7 C Pontianak*

*Telp/Fax : (0561) 730416*

*Email : dkump@pontianakkota.go.id*

*Website : diskumdag.pontianakkota.go.id*